



Potensi Gagal Jadi Keluarga Mandiri

YOGYA, TRIBUN - Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sudah berjalan sejak 18 Juli sampai sekarang. Diharapkan kedua bantuan tersebut dapat menjadi solusi di tengah sulitnya masyarakat mencari nafkah saat pandemi dan kebijakan pencegahannya.

Kendati demikian, Dinas Sosial (Dinsos) DIY kini berharap cemas lantaran masyarakat yang sudah terlepas dari program PKH, dikhawatirkan rentan untuk masuk kembali sebagai penerima bantuan akibat ekonomi yang sulit.

Kepala Dinsos DIY, Endang Patmintersih mengatakan, masyarakat penerima bantuan PKH akan mendapat uang sesuai komponennya. "Jadi PKH dia mendapat bantuan uang sesuai komponennya. Kemudian karena PPKM Darurat kemarin, maka PKH mendapat tambahan beras 10 Kilogram," katanya, saat dikonfirmasi, Minggu (1/8).

Kemudian lanjut Endang, bagi penerima BST yang sebelumnya hanya dapat cair dalam empat bulan mulai Januari-April 2021, kini mendapat tambahan dua bulan karena adanya kebijakan PPKM. "Kemarin penerima hanya empat bulan Januari sampai April. Yang per KK Rp300 ribu itu. Karena ada PPKM Darurat diperpanjang dua bulan lagi. Untuk bulan Mei-Juni diterimakan Juli sejumlah Rp600 ribu karena dua bulan. Ditambah beras 10 Kilogram," lanjutnya.

Endang menambahkan, melalui Kementerian Sosial, penyaluran BST sejumlah Rp600 ribu pada Mei-Juli lalu diberikan lewat kantor pos dan sejumlah kalurahan. Sementara untuk PKH, Kemensos bekerja sama dengan Bulog selaku distributor beras untuk bantuan sosial tersebut.

Berdasarkan data Dinsos DIY, target penyaluran bantuan tahap ketiga sejak 18-31

● ke halaman 11

Potensi Gagal

● Sambungan Hal 1

Juli 2021 untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima PKH sebanyak 186.017 KPM, sedangkan untuk masyarakat penerima BST di DIY sebanyak 131.280 KPM.

Endang menguraikan, adanya pandemi Covid-19 yang memunculkan kebijakan PPKM Darurat hingga PPKM Level 4 dalam penanganannya, mengakibatkan Dinsos DIY kesulitan mencapai target graduasi para KPM yang masih terdaftar di PKH, maupun pada skema bantuan lainnya yang sudah ditentukan oleh Kemensos. "Pandemi dan PPKM ini pasti, pasti mempengaruhi target PKH graduasi. Jadi yang sudah graduasi pun

kami push dengan APBD untuk penguatan ekonomi produktifnya," jelasnya

PKH graduasi sendiri merupakan KPM yang sudah dianggap mampu dan dapat menghasilkan produk ekonomi secara mandiri, sehingga keluarga tersebut tidak lagi bergantung pada pemberian bantuan PKH.

Di tahun ini, Dinsos DIY mencatat ada sekitar 825 KK yang sudah masuk sebagai PKH graduasi. Jumlah tersebut kini juga menjadi perhatian khusus bagi Dinsos DIY supaya mereka tidak kembali masuk sebagai masyarakat yang rentan dalam segi kesejahteraan dan ekonomi. "Dalam kondisi pandemi dan PPKM ini mereka (PKH Graduasi) ini memang butuh perhatian khusus," jelas Endang.

Target sulit

Endang mengakui, di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini sangat sulit mencapai target pengentasan PKH graduasi sebanyak 10 persen. "Tentunya dalam situasi sekarang sangat sulit. Karena yang udah masuk PKH graduasi artinya mandiri saja mereka juga butuh pendampingan, apalagi mengentaskan yang lain," terang dia.

Ia berharap pandemi segera berlalu dan bagi keluarga yang sudah masuk ke dalam kategori graduasi tetap dapat bertahan. "Yang sudah masuk graduasi kan sudah dapat bantuan Rp3 juta untuk pengembangan produk ekonomi dari APBD. Mudah-mudahan bisa bertahan semua," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005